Jurnal Ilmiah Manajemen

COOPETITION

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN IKOPIN

Vol. VII, No. 2, Nopember 2016 ISSN : 2086-4620

IKOPIN

DAFTAR ISI

Transportasi Publik sebagai Investasi Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat

oleh: Hendra Wijaya dan Eka Setiajatnika ..... 69 – 78

Pengaruh Penilaian Hasil Pelatihan Akuntansi dan Penerapan Materinya terhadap Kinerja Administrasi Keuangan Koperasi

oleh: Sarah Asina Maria Sitompul ..... 79 – 98

Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Belajar dan Etos Kerja Guru terhadap Efektifitas Pembelajaran(Studi Kasus Pada Madrasah Aliyah Plus Darul Hufadz Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang)

oleh: Santi Martika ..... 99 – 111

Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa

oleh: Badriyatul Huda ..... 113 – 118

Koperasi sebagai Perusahaan

oleh: Ramudi Ariffin ..... 119 – 122

Analisis Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Kunjungan Wisatawan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata(Studi Kasus di Kota Bandung Tahun 2008 – 2015)

oleh: Rakhmat Haryono dan Heri Nugraha ..... 123 – 126

DEWAN REDAKSI

PELINDUNG
Dr. (H.C.) Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A.
(Rektor)

PENASEHAT
Ir. Hj. Yuanita Indriani, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)

Drs. H. Dindin Burhanudin, M.Sc.
(Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, SDM, dan Umum)

Ir. H. Indra, Fahmi M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama)

PIMPINAN UMUM
Dr. H. Sugiyanto, M.Sc.
(Direktur Program Studi Magister Manajemen)

PENASIHAT REDAKSI
Prof. Dr. H. R. M. Ramudi Ariffin, M.Si.
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

Dr. Muslimin Nasution, A.P.U.
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

PENYUNTING PELAKSANA
Prof. Dr. Faisal Afiff, Spec. Lic.
(Universitas Padjadjaran)

Prof. Dr. Ir. H. Tuhpawana Priatna Sendjaja
(Universitas Padjadjaran)

Prof. Dr. Hakim L. Malasan
(Institut Teknologi Bandung)

Dr. Ir. H. Wawan Lulus Setiawan, M.Sc.
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

Dr. Ir. H. Ery Supriyadi, M.Ti.
(Institut Manajemen Koperasi Indonesia)

PENYUNTING AKHIR
Dr. Trida Gunadi, M.Si.
Hj. Rosti Setiawati, S.E., M.Si.

TATA LETAK
Dindin Najamudin, S.E.

SEKRETARIAT REDAKSI
Enjang Rukanda, S.Sos.

SIRKULASI
Drs. C. Suryana Yusuf
Lili Sobarnas

ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA DAN KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA

(Studi Kasus di Kota Bandung Tahun 2008 - 2015)

Rakhmat Haryono
Lulusan Magister Manajemen Koperasi Indonesia

Heri Nugraha
Institut Manajemen Koperasi Indonesia

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung periode 2013 – 2018 memaparkan visi Kota Bandung menjadi "Kota Bandung Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)", salah satu misi Kota Bandung adalah mengembangkan perekonomian Kota Bandung yang berdaya saing dengan sasaran "Terwujudnya Pariwisata Yang Berdaya Saing".

Tabel 1.
Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata Antara Kota Bandung, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Bali Periode 2012 – 2014

Daerah	Kontribusi Pariwisata		
	2012	2013	2014
Kota Bandung	7,51%	7,71%	7,97%
Yogyakarta	11,72%	11,84%	11,98%
Bali	20,86%	21,04%	21,02%

Sumber : Kompilasi Kota Bandung dalam Angka. 2015. Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka.2015. Provinsi Bali dalam Angka. 2015

Perkembangan kontribusi Sektor Pariwisata Kota Bandung dari tahun 2012-2014 dapat dikatakan mengalami perlambatan, kondisi ini terjadi karena pariwisata Kota Bandung masih memiliki hambatan dalam pengembangan parkir pariwisata, antara lain, kondisi jalan yang sering macet, ketersediaan lahan parkir yang masih kurang, permasalahan kebersihan kota yang kurang terjaga, sarana transportasi angkutan umum masih belum optimal, kurangnya sarana prasarana pariwisata yang memadai, aktivitas dan perencanaan pariwisata belum optimal, (Tribunnews.2012 dan Republika. 2016). Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor Pariwisata Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Bali, Kota Bandung masih tertinggal, pariwisata di provinsi Yogyakarta dan provinsi Bali menduduki ranking pertama.

Dengan berlakunya undang-undang mengenai pajak dan retribusi daerah No 91 tahun 2010, peran pemda dalam pengelolaan anggaran pembangunan menjadi lebih besar, dapat pula dikatakan terjadi transfer fiskal dari Pusat ke Daerah. Artinya kebijakan alokasi anggaran yang tadinya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kemudian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2
Penerimaan Asli Daerah Kota Bandung
Tahun 2005 – 2014
(dalam Rp 000)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang sah	Jumlah
2005	225.596	834.223	32.580.000	1.092.399.641
2006	255.300	1.139.843	2.749.000	1.397.891.625
2007	287.556	1.097.176	301.213.229	1.685.944.883
2008	314.627	1.360.460	343.754.125	2.018.841.348
2009	360.066	1.486.375	555.988.294	2.402.429.239
2010	441.871	1.459.245	539.052.488	2.440.168.433
2011	834.596	1.405.393	8.753.080.880	10.993.069.315
2012	1.407.759	1.818.170	1.818.170.049	5.044.099.204
2013	1.442.775	1.778.972	1.778.972.208	5.000.719.654
2014	1.762.952	2.011.271	2.011.270.787	5.785.493.801

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka. 2005-2014

Menurut penelitian Hirawan, bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil dan bahkan hanya sekitar 4% dari keseluruhan penerimaan negara (Insukindro, Dick., 2004:2). Sebagai contoh, proporsi penerimaan daerah terhadap APBD di Kota Bandung selama kurun waktu 2012 sampai tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 2 di atas.

Tabel 3.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Periode 2012 – 2014

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Parkir
2005	12,04	15,33	0,29	17,33	54,00	1,01
2006	27,04	21,84	6,97	15,85	26,08	2,23
2007	37,16	26,23	11,48	14,85	7,22	3,05
2008	30,40	26,58	9,33	7,77	23,44	2,47
2009	24,68	26,88	7,50	1,78	37,18	1,97
2010	29,13	24,48	8,39	3,90	32,15	1,95
2011	31,91	22,97	8,95	5,22	29,00	1,94
2012	34,18	23,56	8,20	4,27	28,06	1,73
2013	35,88	24,00	7,64	3,56	27,35	1,58
2014	37,21	24,34	7,20	3,00	26,80	1,45

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka. 2004 - 2015

Dalam tabel 2 dan tabel 3. terlihat rata-rata pertumbuhan pajak hotel Kota Bandung pada periode 2005-2014 sebesar 29,96 persen, pajak restoran sebesar 23,62 persen, pajak hiburan sebesar 7,59 persen, pajak reklame sebesar 7,75 persen, pajak penerangan jalan sebesar 29,13 persen, dan rata-rata pertumbuhan pajak parkir sebesar 1,94 persen.

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Sektor Pariwisata Kota Bandung dengan judul: "Analisis Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata(Studi Kasus Di Kota Bandung Tahun 2008 – 2015)".

2. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud penelitian ini adalah menganalisis Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kota Bandung. Sedangkan tujuanpenelitian:

1. Menganalisis pengaruh investasi pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kota Bandung.
2. Menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kota Bandung.
3. Menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kota Bandung.
4. Menganalisis upaya pemerintah Kota Bandung mengelola Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Hubungan Variabel Investasi Pemerintah Terhadap PAD Sektor Pariwisata

Investasi pemerintah yang dikeluarkan pada sektor pariwisata akan memberikan manfaat terhadap keberlangsungan pariwisata tersebut. Secara umum investasi pemerintah diarahkan untuk menjalankan perekonomian. Hanya bagian kecil saja dalam aktivitas pariwisata infrastrukturnya yang dibangun oleh pemerintah. Secara langsung investasi pemerintah pada sektor pariwisata bisa berbentuk pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata, perijinan, pendidikan, moneter, fiskal, promosi, peraturan perundang-undangan guna mendukung pengembangan pariwisata.

Melihat kondisi dan potensi DTW di Kota Bandung maka pemerintah perlu melakukan pengembangan pariwisata untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sujai (2011), Tingkat pertumbuhan yang tinggi di sektor pariwisata membutuhkan investasi yang cukup besar baik investasi pemerintah maupun investasi swasta. Oleh karena itu, dukungan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di sektor pariwisata ini sangat penting.

3.2. Hubungan Variabel Investasi Swasta Terhadap PAD Sektor Pariwisata

Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta di sektor pariwisata lebih banyak dilakukan pada pembangunan Hotel dan Akomodasi lainnya. Data Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Bandung menunjukkan nilai PMTB dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan peningkatan sebesar 11,3 persen per tahun sebaliknya investasi pemerintah pada sector pariwisata pada periode yang sama hanya 5,9 persen per tahun. Komposisi

terbesar PMTB Kota Bandung dibentuk dari investasi swasta, Hal ini antara lain disebabkan oleh minimnya dan terbatasnya anggaran pemerintah utamanya anggaran pembangunan, disamping upaya pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sector pariwisata ini. Kondisi ini merupakan dampak dari perkembangan pariwisata yang semakin pesat di Kota Bandung. Investor dapat melihat jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Berkembangnya usaha di bidang akomodasi & makan minum, dan perdagangan di Kota Bandung dampak dari perkembangan dunia pariwisata dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung dan dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang dihimpun oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arief Hartoko (2009), investasi sarana pariwisata berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Dengan tersedianya akomodasi pariwisata yang memadai akan menarik wisatawan untuk berkunjung. Pembayaran yang dilakukan oleh wisatawan untuk akomodasi seperti hotel restoran, hiburan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan salah satu komponen dari PAD industri pariwisata.

3.3. Hubungan Variabel Kunjungan Wisatawan Terhadap PAD Sektor Pariwisata

Kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan industri pariwisata khususnya di Kota Bandung. Rantetadung (2012) menyatakan bahwa pengaruh kunjungan wisatawan sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah sehingga wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung. Adanya dukungan alokasi dana dari pemerintah setiap tahunnya menjadikan sektor pariwisata mengembangkan tempat wisata agar banyak dikunjungi oleh wisatawan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Keberhasilan pengembangan pariwisata di Kota Bandung akan memberikan dampak yang positif kepada penerimaan daerah dan wisatawan itu sendiri. Menurut Marpaung (2002) perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik dari tempat wisata.

4. UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam industri pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu Negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) industri pariwisata. Menurut Riska (2013), peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya secara garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa dan pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebuda-yaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel investasi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan dan pajak reklame dengan tingkat signifikasn sebesar 95%.

2. Variabel investasi swasta memiliki pengaruh yang signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame dengan tingkat signifikasn sebesar 95%.
3. Variabel kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame dengan tingkat signifikasn sebesar 95%.

6. SARAN

1. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah pemerintah diharapkan dapat melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sehingga perolehan pajak daerah dapat meningkat sesuai dengan target.
2. Pengembangan sektor pariwisata di Kota Bandung dapat dilakukan dengan mengembangkan objek wisata yang tidak membutuhkan modal besar tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Both, Kenneth Davey, Ropy Kelly (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerjemah Masri Maris. Universitas Indonesia (UI-PRESS). Jakarta.

Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Guritno Mangkoesoebroto, 2001. Ekonomi Publik. Cet. 10. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Penerbit Andi

Mudrajat Kuncoro.2006. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMPYKPN. Yogyakarta.

Rahmanta Ginting. 2011. Kebijakan Publik Dalam Eksternalitas. Pusat Kajian Ilmu Administrasi. FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.

Rochmat Sumitro.2008. Asas-asas hukum Perpajakan. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.